



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.2313-Bagor/2022

TENTANG

TIM STRATEGIS AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor : B/294/AA.05/2021 perihal Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada tanggal 7 Maret 2022, perlu dilakukan pelaksanaan strategi serta tindak lanjut perbaikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Strategis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Strategis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KEDUA mempunyai target :
- a. predikat AKIP Kota Bandung “A”;
 - b. hasil Evaluasi AKIP Internal semua Perangkat Daerah Kota Bandung berpredikat “A” ; dan
 - c. pengukuran kinerja sampai ke level Individu.
- KEEMPAT : Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim melaksanakan Tugas, Strategi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2022

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 061/Kep.2313-Bagor/2022
TANGGAL : 12 September 2022

SUSUNAN TIM STRATEGIS
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah.
Sekretaris : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
Bidang-bidang
1. Monitoring dan Evaluasi Bulanan Capaian IKU dan Janji Wali Kota
Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 2. Komponen Perencanaan Kinerja
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
 3. Komponen Pengukuran Kinerja
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
 4. Pelaporan Kinerja
Koordinator : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 5. Evaluasi Kinerja
Koordinator : Inspektur Daerah Kota Bandung.
 6. Regulasi
Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 7. Inovasi dan Aplikasi
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.
 8. Pembudayaan Kinerja
Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

Pelaksana ...

- Pelaksana Kinerja : 1. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Para Camat;
3. Para Direktur Rumah Sakit Kota Bandung; dan
4. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Bandung.
- Kesekretariatan : 1. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Analis Kebijakan pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALNAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 061/Kep.2313-Bagor/2022
TANGGAL : 12 September 2022

TUGAS TIM STRATEGIS AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022

- A. Pengarah : Memberikan arahan kepada Tim.
- B. Ketua : Mengkoordinasikan tugas Tim dan melaporkan secara berkala kepada Pengarah.
- C. Sekretaris : Menyiapkan pelaporan kepada Ketua dan koordinasi dengan KEMENPAN RB.
- D. Bidang-bidang :
1. Koordinator Monitoring dan Evaluasi Bulanan Capaian IKU dan Janji Wali Kota : Memonitoring dan mengevaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Janji Wali Kota setiap bulan dan melaporkan kepada Pengarah melalui Ketua.
 2. Koordinator Komponen Perencanaan Kinerja : Pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Pemerintah Kota Bandung Komponen Perencanaan Kinerja.
 3. Koordinator Komponen Pengukuran Kinerja : Pemenuhan LKE AKIP Pemerintah Kota Bandung Komponen Pengukuran Kinerja.
 4. Koordinator Pelaporan Kinerja : Pemenuhan LKE AKIP Pemerintah Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja.
 5. Koordinator Evaluasi Kinerja : Pemenuhan LKE AKIP Pemerintah Kota Bandung Komponen Evaluasi Kinerja.
 6. Koordinator Regulasi : Finalisasi produk hukum daerah untuk menunjang Akuntabilitas Kinerja.
 7. Koordinator Inovasi dan Aplikasi : Penyiapan Inovasi dan Aplikasi untuk menunjang Akuntabilitas Kinerja.

8. Koordinator ...

8. Koordinator : Sosialisasi Internalisasi *Core Values* Aparatur Sipil
Pembudayaan Negara (ASN) dan Organisasi Berkinerja Tinggi.
Kinerja
- E. Pelaksana Kinerja : Melaksanakan pencapaian kinerja.
- F. Kesekretariatan : Membantu Sekretaris.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 061/Kep.2313-Bagor/2022
TANGGAL : 12 September 2022

STRATEGI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2022

1. Penjenjangan Kinerja sampai dengan level Individu;
2. Pemaparan Rencana Strategi sampai September 2023 dan Rencana Aksi untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Janji Wali Kota oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota;
3. Penandatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota;
4. Monitoring dan Evaluasi Bulanan capaian Kinerja IKU dan Janji Wali Kota Perangkat Daerah;
5. Pemberian *Reward or Punishment* atas Capain Kinerja kepada Perangkat Daerah dan Individu; dan
6. Penerapan Inovasi dan Aplikasi untuk Akuntabilitas Kinerja.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pejabat Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN IV : SALNAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.2313-Bagor/2022

TANGGAL : 12 September 2022

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022

NO	REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP TAHUN 2021	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN TAHUN 2022	OUTPUT PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL
1.	Memastikan bahwa peta proses bisnis menggambarkan proses pencapaian kinerja pada setiap PD. Peta proses bisnis ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam perumusan cascading kinerja utama pada setiap PD sampai level individu, untuk memastikan bahwa setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja di masing-masing PD.	Sinkronisasi peta Proses Bisnis (PERMENPAN RB 19/2018) dan perumusan Cascading/ Penjenjangan Kinerja (PERMENPAN RB 89/2021)	Peta Proses Bisnis, Peta Sub Proses Bisnis, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi	• Bagian Organisasi	Sampai dengan akhir Agustus
			Reviu Mind Mapping/ Logical Framework setiap Sasaran dalam RPJMD sampai kondisi operasional.	• BAPPELITBANG	Sampai dengan akhir Agustus
2.	Cascading kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, penyusunan indikator kinerja utama (IKU) akan mengacu pada cascading kinerja tersebut.	1. Penyusunan KEPWAL Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan RPJMD 2018-2023.	KEPWAL Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023	• BAPPELITBANG • Bagian Hukum	Minggu ke - 3 Agustus
		2. Verifikasi kesesuaian data antar dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian dengan data online (e-SAKIP dan e-sakipreviu).	Laporan hasil Verifikasi kesesuaian data antar dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta kesesuaian dengan data online (e-SAKIP dan e-sakipreviu).	• Inspektorat • BAPPELITBANG • Bagian Organisasi	Sampai dengan akhir Agustus
		3. Sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan 5 (lima) tahapan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah;	1. Sosialisasi berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Rancangan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Daerah; 3. Rancangan Penjenjangan Perangkat Daerah.	• BAPPELITBANG	Sampai dengan akhir Agustus

NO	REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP TAHUN 2021	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN TAHUN 2022	OUTPUT PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL
3.	Melakukan reviu dan refocusing terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategi.	1. Pendampingan Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan/penyusunan Rencana Aksi atas pencapaian IKU dan Janji Wali Kota;	Laporan hasil perbaikan/penyusunan Rencana Aksi atas pencapaian IKU dan Janji Wali Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPELITBANG • semua Perangkat Daerah 	Sampai dengan pertengahan September
		2. Pemaparan Kepala Perangkat Daerah tentang “Rencana Aksi/Strategi dalam Pencapaian IKU dan Janji Wali Kota”	Kegiatan pemaparan “Rencana Aksi/Strategi dalam Pencapaian IKU dan Janji Wali Kota”	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah, • semua Perangkat Daerah 	Sampai dengan pertengahan September
		3. Penandatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Kota.	Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • BKPSDM, • Bagian Organisasi 	Awal Oktober
4.	Mereviu indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.	1. Dialog Kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah;	Perjanjian Kinerja (PK), SKP dan Berita Acara Dialog Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • BKPSDM • semua Perangkat Daerah 	Minggu ke – 2 September
		2. Pendampingan penyusunan IKI dan SKP (PERMENPAN 6/2022)	Pengisian IKI dan SKP dalam Aplikasi MangBagja	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo, • BKPSDM, dan • Individu ASN 	Minggu ke – 2 September
5.	Melakukan penyempurnaan sistem pengendalian internal di seluruh PD dengan mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja.	1. Pendampingan Manajemen Resiko kepada Perangkat Daerah.	Dokumen Manajemen Resiko Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • semua Perangkat Daerah 	Sampai dengan awal September

NO	REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP TAHUN 2021	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN TAHUN 2022	OUTPUT PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL
6.	Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggung jawab program melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas PD untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.	1. Perbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi pencapaian IKU dan Janji Wali Kota oleh Perangkat Daerah setiap triwulan;	1. Surat Edaran (SE) dan sosialisasi monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja; 2. Sosialisasi Surat Edaran (SE) dan pendampingan teknis monitoring dan evaluasi pencapaian IKU dan Janji Wali Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Daerah • Asisten Pemerintahan dan KESRA; • Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; • Asisten Administrasi Umum; • Semua Kepala Perangkat Daerah. 	Sampai dengan akhir Agustus
2.		Monitoring evaluasi triwulanan pencapaian IKI oleh ASN	• BKPSDM	Sampai dengan akhir Desember	
3.		Perubahan PERWAL Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> • BKPSDM • Bagian Hukum 	Sampai dengan akhir Desember	
7.	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja PD sehingga dapat tercipta pemahaman yang sama antar PD dan mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja PD ke depan, serta mendorong seluruh pimpinan PD menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal.	1. Penyusunan PERWAL Pedoman Evaluasi AKIP Internal untuk Perangkat Daerah (PERMENPAN 88/2021);	PERWAL Pedoman Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat • Bagian Hukum 	Bulan Juli 2022 (Selesai)
2.		Laporan Bimtek Evaluator AKIP	• Inspektorat	Bulan Juli 2022 (Selesai)	
3.		1. LKE dan LHE Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah 2. Gelar Pengawasan/ AKIP Perangkat Daerah Award	• Inspektorat	Bulan Juli 2022 (Selesai) Bulan Desember 2022	
8	Non Rekomendasi	Pengecekan Pelaporan Kinerja Tahun 2021 dan Triwulanan 2022 pada ESAKIP dengan PERMENPAN RB Nomor 53/2014	Status Pelaporan AKIP Perangkat Daerah	• Bagian Organisasi	Sampai dengan akhir Agustus

NO	REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP TAHUN 2021	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN TAHUN 2022	OUTPUT PERBAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL
9	Non Rekomendasi	Internalisasi Core Values ASN dan Pembudayaan Organisasi Berkinerja Tinggi	Materi sosialisasi Internalisasi Core Values ASN dan Pembudayaan Organisasi Berkinerja Tinggi kepada Perangkat Daerah	• BKPSDM	
10	Non Rekomendasi	Pendampingan Perangkat Daerah sebagai sampel Cluster dalam persiapan Evaluasi oleh KEMENPAN RB berdasarkan Surat Deputi KUNWAS RN MENPAN RB Nomor B/694/AA.05/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Permintaan Matriks Tindak Lanjut RB dan SAKIP	Pemenuhan LKE AKIP Kota dan Pendampingan dalam pemenuhan LKE pada Perangkat Daerah (DPMPTSP, DINSOS, DISNAKER, DINKES, DISDAGIN, DBMSDA, DISKOMINFO, BAPPELITBANG dan Inspektorat)	• Tim Strategis Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	Sampai dengan September

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

NO	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN TAHUN 2022	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
12	Perbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi pencapaian IKU dan Janji Wali Kota oleh Perangkat Daerah setiap triwulan;																					
13	Mekanisme monitoring evaluasi pencapaian IKI oleh ASN setiap triwulan;																					
14	Perbaiki PERWAL Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai.																					
15	Penyusunan PERWAL Pedoman Evaluasi AKIP Internal untuk Perangkat Daerah (PERMENPAN 88/2021);																					
16	Bimtek Evaluator Akuntabilitas Kinerja																					
17	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan PERWAL Pedoman Evaluasi Kinerja Internal untuk Perangkat Daerah;																					
18	Pengecekan Pelaporan Kinerja Tahun 2021 dan Triwulanan 2022 pada ESAKIP dengan PERMENPAN RB Nomor 53/2014																					
19	Internalisasi Core Values ASN dan Pembudayaan Organisasi Berkinerja Tinggi																					
20	Pendampingan Perangkat Daerah sebagai sampel Cluster dalam persiapan Evaluasi oleh KEMENPAN RB berdasarkan Surat Deputi KUNWAS RN MENPAN RB Nomor B/694/AA.05/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Permintaan Matriks Tindak Lanjut RB dan SAKIP																					

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002